



**PIMPINAN DPRD KOTA PANGKAL PINANG  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

KEPUTUSAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PANGKAL PINANG

NOMOR : 188.4/08/DPRD/VII/2025

TENTANG  
PERSETUJUAN TERHADAP NOTA KEUANGAN DAN RANCANGAN PERATURAN  
DAERAH KOTA PANGKAL PINANG TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA PANGKAL PINANG TAHUN  
ANGGARAN 2025 MENJADI PERATURAN DAERAH KOTA PANGKAL PINANG  
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KOTA PANGKAL PINANG TAHUN ANGGARAN 2025

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA PANGKAL PINANG,

- Menimbang** : a. bahwa Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun Anggaran 2025, telah disampaikan oleh Pj. Walikota Pangkal Pinang dalam Rapat Paripurna Keenam Belas, Masa Persidangan III Tahun 2025 DPRD Kota Pangkal Pinang pada tanggal 23 Juni 2025, yang kemudian dilakukan pembahasan oleh Badan Anggaran DPRD Kota Pangkal Pinang bersama TAPD Kota Pangkal Pinang, dan memperhatikan Pendapat Akhir Fraksi terhadap Nota Keuangan dan Raperda tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pangkalpinang Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Laporan Badan Anggaran DPRD Kota Pangkal Pinang terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun Anggaran 2025, perlu mendapat persetujuan DPRD Kota Pangkal Pinang;
- c. bahwa, berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkal Pinang;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 27 tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4210);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023, Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2024 tentang Kota Pangkalpinang di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6949);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5340);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165 );
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322 );
18. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883 );
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, Dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
25. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2016 Nomor 18), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2020 Nomor 1);
26. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2022 Nomor 34);

## MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :  
KESATU : Menerima dan Menyetujui Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun Anggaran 2025 menjadi Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun Anggaran 2025.
- KEDUA : Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, yang semula berjumlah **Rp. 1.045.262.725.458,00** berkurang sejumlah **(Rp. 2.001.403.479,10)** sehingga menjadi **Rp. 1.043.261.321.978,90** dengan perincian sebagai berikut :
1. Pendapatan Daerah
    - a. Semula **Rp. 962.787.909.701,00**
    - b. Bertambah/(berkurang) **Rp. 23.700.019.556,00**  
Jumlah Pendapatan Daerah setelah perubahan **Rp. 986.487.929.257,00**
  2. Belanja Daerah
    - a. Semula **Rp. 1.045.262.725.458,00**
    - b. Bertambah/(berkurang) **(Rp. 2.001.403.479,10)**  
Jumlah Belanja Daerah setelah perubahan **Rp. 1.043.261.321.978,90**
  3. Pembiayaan Daerah
    - a. Penerimaan
      1. Semula **Rp. 82.474.815.757,00**
      2. Bertambah/(berkurang) **Rp. (25.701.423.035,10)**  
Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah perubahan **Rp. 56.773.392.721,90**
    - b. Pengeluaran
      1. Semula **Rp. 0,00**
      2. Bertambah/(berkurang) **Rp. 0,00**  
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah perubahan **Rp. 0,00**
  4. Jumlah Pembiayaan Netto setelah Perubahan **Rp. 56.773.392.721,90**
  5. Sisa Kurang Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan setelah Perubahan **Rp. 0,00**
- KETIGA : Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA angka 1 terdiri dari :
1. Pendapatan Asli Daerah sejumlah
    - a. Semula **Rp. 236.668.835.701,00**
    - b. Bertambah/(berkurang) **(Rp. 2.487.125.955,00)**  
Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah perubahan **Rp. 234.181.709.746,00**
  2. Pendapatan Dana Transfer
    - a. Semula **Rp. 719.902.074.000,00**

- b. Bertambah/(berkurang) **Rp. 21.992.935.511,00**  
Jumlah Dana Perimbangan setelah perubahan **Rp. 741.895.009.511,00**

- 3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah
  - a. Semula **Rp. 6.217.000.000,00**
  - b. Bertambah/(berkurang) **Rp. 4.194.210.000,00**  
Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah **Rp. 10.411.210.000,00**

Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada angka 1 terdiri dari jenis pendapatan :

- 1. Pajak Daerah
  - a. Semula **Rp. 174.704.333.400,00**
  - b. Bertambah/(berkurang) **(Rp. 29.184.797.940,00)**  
Jumlah Pajak Daerah setelah perubahan **Rp. 145.519.535.460,00**
- 2. Retribusi Daerah
  - a. Semula **Rp. 52.638.545.000,00**
  - b. Bertambah/(berkurang) **Rp. 14.801.329.160,00**  
Jumlah Retribusi Daerah setelah perubahan **Rp. 67.439.874.160,00**
- 3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan
  - a. Semula **Rp. 6.707.028.141,00**
  - b. Bertambah/(berkurang) **Rp. 0,00**  
Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan setelah perubahan **Rp. 6.707.028.141,00**
- 4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah
  - a. Semula **Rp. 2.618.929.160,00**
  - b. Bertambah/(berkurang) **Rp. 11.896.342.825,00**  
Jumlah lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah setelah perubahan **Rp. 14.515.271.985,00**

Pendapatan Dana Transfer sebagaimana dimaksud pada angka 2 terdiri dari jenis pendapatan :

Pendapatan Dana Transfer Pemerintah Pusat

- 1. Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)
  - a. Semula **Rp. 42.649.150.000,00**
  - b. Bertambah/(berkurang) **Rp. 0,00**  
Jumlah Dana Bagi Hasil setelah perubahan **Rp. 42.649.150.000,00**
- 2. Dana Alokasi Umum
  - a. Semula **Rp. 474.515.576.000,00**
  - b. Bertambah/(berkurang) **(Rp. 4.509.834.000,00)**  
Jumlah Dana Alokasi Umum setelah perubahan **Rp. 470.005.742.000,00**
- 3. Dana Alokasi Khusus Fisik
  - a. Semula **Rp. 61.999.180.000,00**
  - b. Bertambah/(berkurang) **Rp. 0,00**  
Jumlah Dana Alokasi Khusus Fisik setelah perubahan **Rp. 61.999.180.000,00**

4. Dana Alokasi Khusus Non Fisik
  - a. Semula **Rp. 99.502.629.000,00**
  - b. Bertambah/(berkurang) **Rp. 54.720.000,00**Jumlah Dana Alokasi Khusus Non Fisik setelah perubahan **Rp. 99.557.349.000,00**

Pendapatan Dana Transfer Antar Daerah

1. Pendapatan Bagi Hasil Pajak
  - a. Semula **Rp. 34.250.000.000,00**
  - b. Bertambah/(berkurang) **Rp. 23.848.049.511,00**Jumlah Pendapatan Bagi Hasil Pajak setelah perubahan **Rp. 58.098.049.511,00**
2. Bantuan Keuangan
  - a. Semula **Rp. 0,00**
  - b. Bertambah/(berkurang) **Rp. 2.600.000.000,00**Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah perubahan **Rp. 2.600.000.000,00**

Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada angka 3 terdiri dari jenis pendapatan :

1. Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP
  - a. Semula **Rp. 6.217.000.000,00**
  - b. Bertambah/(berkurang) **Rp. 4.194.210.000,00**Jumlah Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP setelah perubahan **Rp. 10.411.210.000,00**

KEEMPAT : Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA angka 2 terdiri dari :

1. Belanja Operasi
  - a. Semula **Rp. 925.214.690.867,00**
  - b. Bertambah/(berkurang) **Rp. 20.944.667.999,82**Jumlah Belanja Operasi setelah perubahan **Rp. 946.159.358.866,82**
2. Belanja Modal
  - a. Semula **Rp. 109.429.848.662,00**
  - b. Bertambah/(berkurang) **(Rp. 12.989.582.740,00)**Jumlah Belanja Modal setelah perubahan **Rp. 96.440.265.922,00**
3. Belanja Tidak Terduga
  - a. Semula **Rp. 10.618.185.929,00**
  - b. Bertambah/(berkurang) **(Rp. 9.956.488.738,92)**Jumlah Belanja tidak terduga setelah perubahan **Rp. 661.697.190,08**

Belanja Operasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 terdiri atas :

1. Belanja Pegawai
  - a. Semula **Rp. 534.697.917.369,00**
  - b. Bertambah/(berkurang) **Rp. 10.132.580.788,82**Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan **Rp. 544.830.498.157,82**

2. Belanja Barang dan Jasa
  - a. Semula **Rp. 379.132.450.898,00**
  - b. Bertambah/(berkurang) **(Rp. 21.939.549.789,00)**  
Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah perubahan **Rp. 357.192.901.109,00**
3. Belanja Hibah
  - a. Semula **Rp. 10.326.482.600,00**
  - b. Bertambah/(berkurang) **Rp. 32.751.637.000,00**  
Jumlah Belanja Hibah setelah perubahan **Rp. 43.078.119.600,00**
4. Belanja Bantuan Sosial
  - a. Semula **Rp. 1.057.840.000,00**
  - b. Bertambah/(berkurang) **Rp. 0,00**  
Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah perubahan **Rp. 1.057.840.000,00**

Belanja Modal sebagaimana dimaksud pada angka 2 terdiri atas :

1. Belanja Modal Tanah
  - a. Semula **Rp. 3.831.900.000,00**
  - b. Bertambah/(berkurang) **(Rp. 3.831.900.000,00)**  
Jumlah Belanja Modal Tanah setelah perubahan **Rp. 0,00**
2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin
  - a. Semula **Rp. 29.320.203.396,00**
  - b. Bertambah/(berkurang) **Rp. 2.955.959.511,00**  
Jumlah Belanja Modal Peralatan dan Mesin setelah perubahan **Rp. 32.276.162.907,00**
3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan
  - a. Semula **Rp. 36.140.197.311,00**
  - b. Bertambah/(berkurang) **(Rp. 1.167.855.900,00)**  
Jumlah Belanja Modal Gedung dan Bangunan setelah perubahan **Rp. 34.972.341.411,00**
4. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi
  - a. Semula **Rp. 28.374.794.012,00**
  - b. Bertambah/(berkurang) **(Rp. 9.291.803.012,00)**  
Jumlah Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi setelah perubahan **Rp. 19.082.991.000,00**
5. Belanja Modal Aset tetap lainnya
  - a. Semula **Rp. 11.663.753.943,00**
  - b. Bertambah/(berkurang) **(Rp. 1.668.783.339,00)**  
Jumlah Belanja Modal Aset tetap lainnya setelah perubahan **Rp. 9.994.970.604,00**
6. Belanja Modal Aset lainnya
  - a. Semula **Rp. 99.000.000,00**
  - b. Bertambah/(berkurang) **Rp. 14.800.000,00**  
Jumlah Belanja Modal Aset lainnya setelah perubahan **Rp. 113.800.000,00**

Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada angka 3 terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu :

1. Belanja Tidak Terduga
  - a. Semula **Rp. 10.618.185.929,00**
  - b. Bertambah/(berkurang) **(Rp. 9.956.488.738,92)**  
Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah perubahan **Rp. 661.697.190,08**

KELIMA : Anggaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA angka 3, terdiri atas :

1. Penerimaan Pembiayaan
  - a. Semula **Rp. 82.474.815.757,00**
  - b. Bertambah/(berkurang) **(Rp. 25.701.423.035,10)**  
Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah perubahan **Rp. 56.773.392.721,90**
2. Pengeluaran Pembiayaan
  - a. Semula **Rp. 0,00**
  - b. Bertambah/(berkurang) **Rp. 0,00**  
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah perubahan **Rp. 0,00**

Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada angka 1 terdiri atas :

1. SiLPA Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya
  - a. Semula **Rp. 82.474.815.757,00**
  - b. Bertambah/(berkurang) **(Rp. 25.701.423.035,10)**  
Jumlah SiLPA Tahun Anggaran Sebelumnya setelah perubahan **Rp. 56.773.392.721,90**
2. Pencairan Dana Cadangan
  - a. Semula **Rp. 0,00**
  - b. Bertambah/(berkurang) **Rp. 0,00**  
Jumlah Pencairan Dana Cadangan setelah perubahan **Rp. 0,00**
3. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan
  - a. Semula **Rp. 0,00**
  - b. Bertambah/(berkurang) **Rp. 0,00**  
Jumlah Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan setelah perubahan **Rp. 0,00**
4. Penerimaan Pinjaman Daerah
  - a. Semula **Rp. 0,00**
  - b. Bertambah/(berkurang) **Rp. 0,00**  
Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah setelah perubahan **Rp. 0,00**
5. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman
  - a. Semula **Rp. 0,00**
  - b. Bertambah/(berkurang) **Rp. 0,00**  
Jumlah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman setelah perubahan **Rp. 0,00**
6. Penerimaan Piutang Daerah
  - a. Semula **Rp. 0,00**
  - b. Bertambah/(berkurang) **Rp. 0,00**  
Jumlah Penerimaan Piutang Daerah setelah perubahan **Rp. 0,00**

Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada angka 2 terdiri atas :

1. Pembentukan Dana Cadangan
  - a. Semula **Rp. 0,00**
  - b. Bertambah/(berkurang) **Rp. 0,00**  
Jumlah Pembentukan Dana Cadangan setelah perubahan **Rp. 0,00**
2. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah
  - a. Semula **Rp. 0,00**
  - b. Bertambah/(berkurang) **Rp. 0,00**  
Jumlah Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah setelah perubahan **Rp. 0,00**
3. Pembayaran Pokok Utang
  - a. Semula **Rp. 0,00**
  - b. Bertambah/(berkurang) **Rp. 0,00**  
Jumlah Pembayaran Pokok Utang setelah perubahan **Rp. 0,00**
4. Pemberian Pinjaman Daerah
  - a. Semula **Rp. 0,00**
  - b. Bertambah/(berkurang) **Rp. 0,00**  
Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah setelah perubahan **Rp. 0,00**

- KEENAM : Uraian perincian selengkapnya tertuang didalam Lampiran Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun Anggaran 2025.
- KETUJUHH : Pelaksanaan teknis administrasi dan penggunaan anggaran serta pendokumentasian berkenaan dengan Keputusan ini, diserahkan sepenuhnya kepada Pemerintah Kota Pangkal Pinang.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalpinang  
pada tanggal 21 Juli 2025

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA PANGKALPINANG  
KETUA,

ABANG HERTZA, S.H., M.H.

WAKIL KETUA,

WAKIL KETUA,

HIBIR

BANGUN JAYA, S.H.